

Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren

Dwi Sulistiani¹

¹ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Corresponding Author:

Dwi Sulistiani

dwisulistiani@pips.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the process of preparing financial statements in terms of recognition, measurement, recording, disclosure, and presentation. This descriptive qualitative study uses primary data with the method of observation, interviews, and Focus Group Discussion, while the secondary data uses the method of literature and documentation. The results show that the Islamic boarding school had not prepared its financial statements in accordance with SAK ETAP, in terms of recognition, measurement, recording, and disclosure. This boarding school uses a single entry system in preparing financial statements and did not present its financial reports in accordance with PSAK 45. Sabilirrosyad just make one report that is cash flow. That is due to the lack of human resources who understand related to accounting. BI and IAI can prepare the socialization and workshop for Islamic boarding schools in order to make the accounting manual book for Islamic boarding schools effectively.

Keywords: Financial Report; Accounting; Islamic Boarding School; SAK ETAP; PSAK 45

Received
03-04-2020

Received in revised form
18-05-2020

Accepted
28-05-2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, pengungkapan serta penyajian di Pondok Pesantren Sabilurrosyad. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan data primer dengan metode observasi, wawancara dan Focus Group Discussion serta data sekunder dengan metode kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan buku pedoman akuntansi pesantren. Dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan masih belum dilakukan sesuai SAK ETAP. Pondok pesantren ini masih menggunakan sistem single entry dalam penyusunan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan juga masih belum sesuai dengan PSAK No. 45. Laporan yang disusun hanya laporan arus kas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang paham ilmu akuntansi. BI dan IAI bisa melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait buku pedoman pondok pesantren atau juga membuat standar yang lebih sederhana untuk pondok pesantren yang masih kecil atau menengah.

Kata kunci: Laporan Keuangan; Akuntansi; Pondok Pesantren; SAK ETAP; PSAK 45

PENDAHULUAN

Kontroversi UU Pesantren salah satunya menyebutkan bahwa pesantren akan mendapatkan dana abadi dari pemerintah, dimana ketentuan tersebut masuk dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menuntut pondok pesantren untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan buku pedoman akuntansi pondok pesantren pada bulan Mei 2018. Buku pedoman tersebut diharapkan bisa mempermudah pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan. Buku pedoman tersebut merupakan kumpulan dari dua standar akuntansi yang seharusnya dipakai sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren. Dua standar tersebut adalah SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), yang mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan, serta PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45, yang mengatur penyajian laporan keuangan. Namun, benarkah dengan adanya buku pedoman tersebut pondok pesantren kemudian menyusun laporan keuangan sesuai dengan kedua standar akuntansi tersebut? Hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar, apalagi untuk pondok pesantren yang tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni terkait akuntansi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nikmatuniayah (2014), Arfin (2014), Andarsari (2017), Tinungki & Pusung (2014) mengenai penerapan PSAK 45 pada organisasi nirlaba seperti yayasan keagamaan, pondok pesantren, masjid, dan yayasan sosial menemukan bahwa organisasi nirlaba tersebut belum menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45. Terdapat beberapa alasan kenapa organisasi nirlaba tersebut tidak menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No. 45, diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi, ketidaktahuan mereka terkait standar akuntansi yang seharusnya serta sistem kepercayaan publik terhadap yayasan keagamaan. Penelitian sebelumnya dilakukan sebelum buku pedoman untuk pondok pesantren dikeluarkan oleh BI dan IAI dan berlaku mulai Mei 2018. Penelitian ini melihat seberapa besar kepatuhan pondok pesantren pada buku pedoman tersebut dan memberikan rekomendasi terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan buku pedoman pondok pesantren yaitu berdasarkan SAK ETAP dan PSAK 45.

Peranan akuntansi dalam segi pengelolaan keuangan sebuah organisasi semakin disadari oleh berbagai pihak, baik organisasi yang berorientasi pada laba maupun non-laba (nirlaba). Organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012).

Pondok pesantren sebagai salah satu organisasi nirlaba merupakan suatu entitas pelaporan yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan. Sebagai suatu entitas pelaporan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan. Pengembangan pesantren secara khusus telah menjadi salah satu target pengembangan ekonomi syariah mengingat perannya yang juga cukup strategis dalam perekonomian di Indonesia. Banyak sekali pesantren di Indonesia yang bisa memberikan dampak baik ekonomis maupun pembangunan akhlak bangsa Indonesia. Juga tidak sedikit pesantren yang sukses dalam pengelolaannya dan bahkan memiliki *profit center* yang memberikan penghasilan yang cukup besar untuk perkembangan pesantren selanjutnya.

Pondok pesantren Sabilurrosyad merupakan pondok pesantren tipe D yang memiliki sekolah yaitu SMPI dan SMAI yang siswa nya menginap atau mondok di tempat ini sekaligus. Pondok pesantren ini didirikan oleh KH Baidowi dan sekarang dipimpin oleh KH Marzuki yang keduanya merupakan Kyai yang cukup berpengaruh di Kota Malang. Jumlah santri dari tahun ke tahun terus meningkat menunjukkan respon yang baik dari masyarakat. Pondok pesantren ini masih dalam tahap *survive* sehingga masih memerlukan penataan manajemen yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan akuntansi pesantren di sana, yang mana rekomendasi penelitian ini akan sangat dibutuhkan di sana.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistiani (2019) terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi di Pondok Pesantren Sabilurrosyad ditemukan bahwa pesantren tersebut belum membuat kode rekening (*chart of account*) dan juga bagan alur dokumen (*flowchart*) terkait transaksi kas masuk dan kas keluar. Sistem Pengendalian Internalnya (SPI) juga belum dilaksanakan dengan baik terbukti dengan adanya perangkatan tugas, formulir yang tidak ada nomor urut tercetak serta

persetujuan atas pengeluaran yang masih belum jelas. Hal tersebut merupakan kekhasan tersendiri dalam pondok pesantren dimana sistem kepercayaan masih sangat kental disana. Kualitas sumber daya manusia yang amanah dan jujur bisa mengurangi dampak Sistem Pengendalian Internal yang kurang tertata.

Berdasarkan wawancara pada pengurus pesantren, masih terdapat kebingungan bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang seharusnya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik pada *stakeholder*. Sumber daya manusia yang masih kurang terkait akuntansi menjadi penyebab belum bisanya Pondok Pesantren Sabilurrosyad menyusun laporan keuangan yang seharusnya.

TINJAUAN LITERATUR

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP digunakan sebagai pedoman bagi entitas/organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan (yang belum go public) baik yang bertujuan untuk mencari laba ataupun tidak. Standar tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan, pengakuan dan pengukuran bagi entitas termasuk di dalamnya adalah pondok pesantren yang merupakan organisasi sektor publik yang tujuannya tidak untuk mencari laba. Penjelasan terkait penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren dengan menggunakan SAK ETAP (IAI, 2009) juga dijelaskan dalam Buku Pedoman Akuntansi Pesantren (BI & IAI, 2018).

Berdasarkan buku pedoman akuntansi pondok pesantren (2018) berikut ini aturan yang harus diperhatikan:

1. Laporan keuangan yayasan pondok pesantren disajikan secara tahunan berdasarkan tahun hijriah atau masehi.
2. Dalam hal yayasan pondok pesantren baru berdiri, maka laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan untuk entitas di mana tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Tujuan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP (IAI, 2009) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan/aktivitas, perubahan ekuitas/aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna (*stakeholder*). Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh manajemen dalam malakukan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan SAK ETAP (IAI, 2009) berikut ini karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan:

1. Dapat dipahami, bahwa laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna
2. Relevan, bahwa hasil laporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh penggunanya.

3. Materialitas, laporan keuangan tidak boleh mencantumkan laporan keuangan yang salah meski hal tersebut dilakukan karena kelalaian, sehingga kelalian tersebut bisa mempengaruhi keputusan penggunaannya
4. Keandalan, informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan bias serta disusun secara wajar.
5. Substansi mengungguli bentuk, dalam tiap transaksi yang terjadi hal substantif/ realita yang ada lebih penting dibandingkan bentuk hukum yang terlihat.
6. Pertimbangan sehat, dalam menyusun laporan keuangan harus hati-hati apalagi untuk kondisi yang tidak pasti serta tidak mengandung bias
7. Kelengkapan, laporan keuangan yang disusun harus lengkap sehingga tidak mengakibatkan informasi yang salah serta mencukupi dalam hal relevansi.
8. Dapat dibandingkan, laporan keuangan yang disusun harus bisa dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas itu sendiri dengan periode yang berbeda juga dengan entitas yang berbeda.
9. Tepat waktu, laporan keuangan yang disusun harus diselesaikan dengan tepat waktu, tidak boleh telat, karena bisa mempengaruhi pengambilan keputusan bagi penggunaannya. Keterlambatan bisa membuat laporan keuangan sudah tidak berguna lagi dalam pengambilan keputusan penting.
10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat, dalam penyusunan laporan keuangan harus dipertimbangkan jumlah biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan didapat oleh entitas.

Berdasarkan SAK ETAP (IAI, 2009) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, berikut ini beberapa definisi terkait komponen laporan keuangan:

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Aset bisa berwujud atau tidak berwujud. Aset yang berwujud ada yang sifatnya lancar dan ada yang tidak lancar/tetap. Aset lancar adalah aset yang dapat segera diuangkan dengan cepat sebelum 1 periode akuntansi (1 tahun). Sedangkan aset tetap adalah aset yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun.
2. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban terdiri dari utang baik jangka pendek ataupun jangka panjang yang harus dibayar oleh entitas pada masa yang akan datang. Selain itu juga kewajiban yang mengharuskan entitas untuk menyediakan jasa atau barang di waktu yang akan datang atas dana yang diterima sekarang
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Yang masuk dalam kategori ekuitas adalah seluruh hak dari pemilik yaitu: seluruh modal yang disetorkan, kelebihan atau keuntungan atas kepemilikannya, pengambilan pemilik atas laba dan juga laba yang tidak dibagi pada pemilik.
4. Penghasilan. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan didapat atas penjualan baik barang atau jasa yang dilakukan oleh entitas, sedangkan keuntungan adalah sisa lebih atas

penjualan aset perusahaan selain dari bisnis utama yang dilakukan oleh entitas.

5. Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Beban merupakan sumber daya yang harus dikeluarkan untuk bisa mendapatkan pendapatan, sedangkan kerugian adalah kebalikan dari keuntungan (gain) yaitu kerugian atas penjualan aset atau lainnya yang bukan merupakan bisnis utama dari entitas tersebut.

Pengakuan merupakan suatu proses dalam membentuk suatu pos yang ada dalam laporan keuangan (neraca dan laba rugi) yang merupakan suatu unsur dengan criteria berikut ini sesuai dengan SAK ETAP (IAI, 2009):

- a. Manfaat ekonomi dimungkinkan akan mengalir dari atau ke dalam entitas terkait pos tersebut; dan
- b. Bisa mengukur biaya atau nilai dalam pos tersebut secara andal.

Pos-pos yang tidak masuk dalam kriteria di atas tidak akan bisa diakui meskipun terdapat pengungkapan kebijakan akuntansi atau catatan/penjelasan. Pengakuan memberikan petunjuk kapan transaksi tersebut dicatat (dilakukan jurnal).

Pengukuran merupakan proses menetapkan nilai/jumlah yang tertera dalam jurnal transaksi akuntansi baik dalam akun asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban yang akan muncul dalam laporan keuangan. Pengukuran tersebut biasanya didasarkan pada biaya historis dan nilai wajar sesuai dengan SAK ETAP (IAI, 2009):

- a. Biaya historis, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban siap untuk digunakan/dimanfaatkan oleh entitas.
- b. Nilai wajar merupakan nilai yang tertera untuk transaksi yang dianggap wajar tanpa adanya hubungan istimewa, contohnya: menggunakan price list atau harga pasaran.

Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk pengungkapan dalam SAK ETAP. CALK memberikan informasi terkait metode akuntansi yang digunakan, transaksi non kas, transaksi yang memerlukan penjelesan lebih lanjut dan informasi lain yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusannya. Ada beberapa transaksi khusus yang perlu adanya pengungkapan yang ditentukan dalam SAK ETAP.

Metode pencatatan akuntansi ada 2 macam, yaitu: dasar kas (*cash basis*) dan dasar akrual (*accrual basis*). Dasar kas jika pencatatan/jurnal dilakukan saat kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan untuk dasar akrual, pencatatan dilakukan saat transaksi terjadi yang telah memnuhi definisi dan criteria pengakuan, meskipun belum dibayar. Entitas pondok pesantren harus menggunakan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangannya (IAI & BI, 2018).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nonprofit

PSAK No. 45 mengatur tentang penyajian laporan keuangan untuk organisasi sektor publik yang tujuannya tidak untuk mencari laba (nirlaba). Berikut ini laporan keuangan yang harus ada sesuai dengan PSAK No. 45 (IAI, 2010):

- 1) Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Laporan keuangan terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan Posisi Keuangan. Laporan yang menunjukkan posisi keuangan entitas yang menunjukkan jumlah asset, kewajiban dan aset neto pada saat tertentu. Penyajian asset dari urutan yang paling lancar sampai dengan yang tidak lancar, demikian juga dengan informasi kewajiban. Aset neto disajikan berdasarkan pembatasan sumbangan mulai dari terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat. Informasi terkait penjelasan hal tersebut ada dalam catatan atas laporan keuangan
- 3) Laporan Aktivitas. Merupakan laporan keuangan yang menunjukkan aktifitas entitas nirlaba yang meliputi: pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian pada suatu periode tertentu. Tujuan laporan aktivitas adalah untuk menyajikan perubahan jumlah asset neto dalam satu periode akuntansi tertentu. Informasi tersebut kemudian akan ditutup dan dimasukkan dalam laporan posisi keuangan. Laporan ini juga menyajikan perubahan klasifikasi asset neto yang terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sementara itu, sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat kontemporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Jika sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, maka dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dan investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian, pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.
- 4) Laporan Arus Kas. Laporan ini menyajikan informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode akuntansi tertentu. Klasifikasi arus kas disajikan dalam PSAK No. 2 dimana aktivitas operasional terdiri dari: penerimaan sumbangan terikat temporer dalam jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan terikat temporer jangka pendek, dan bunga/deviden yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang. Aktivitas investasi dan pendanaan meliputi: sumbangan berupa bangunan atau asset investasi lainnya.

Pondok Pesantren dan Integrasi Islam

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok. Cirinya adalah Kyai menjadi figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai

yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 mengklasifikasikan pondok pesantren menjadi:

- a. Pondok Pesantren Tipe A, yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem *wetonan* atau *sorogan*).
- b. Pondok Pesantren Tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
- c. Pondok Pesantren Tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (di madrasah atau sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri tersebut.
- d. Pondok Pesantren Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

Pengertian pondok pesantren sebagai suatu entitas pelaporan merupakan pondok pesantren yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan. Sebagai suatu entitas pelaporan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan. Beberapa pondok pesantren memiliki unit usaha yang dikelola secara mandiri yang masih merupakan bagian dari badan hukum yayasan pondok pesantren. Unit usaha strategis tersebut termasuk dalam entitas pelaporan pondok pesantren. Unit usaha dari pondok pesantren juga dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum yang terpisah, seperti dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk badan hukum lainnya. Unit usaha tersebut tidak termasuk dalam cakupan entitas pelaporan pondok pesantren.

Surat Al Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al Quran dan secara jelas berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Terdapat 8 kata yang berakar dari kata mencatat dalam ayat tersebut, sedang mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi. Selain ayat tersebut, walau tidak secara spesifik menjelaskan tentang akuntansi, surat An Nisa ayat 58 dapat dijadikan landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya. Selain itu Surat An Nisa ayat 9 menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Etika dalam akuntansi syariah melarang seorang akuntan untuk mengambil atau mengakui suatu aset pihak lain tanpa melalui transaksi yang sah seperti jual-beli.

Sementara itu, dalam surat An Nahl ayat 90 Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan. Sifat adil dan benar sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Bahkan keadilan adalah asas dalam akuntansi syariah. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai posisinya. Sedang kebalikan dari keadilan adalah kedzhaliman. Surat Al Muthaffifin ayat 1-3 menjelaskan tentang larangan berbuat curang. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Termasuk praktek *earning management* dilarang dalam akuntansi syariah kecuali untuk mendatangi *mashlahah* dan menghindari *mudharat*.

Berdasarkan beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa agama Islam sangat menganjurkan adanya praktik akuntansi yang adil dalam bermuamalah untuk

menjaga kepercayaan baik publik ataupun pihak yang diajak bermuamalah. Maka pengelolaan keuangan di pondok pesantren yang dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya sangat diperlukan dalam menjaga akuntabilitas publik.

METODE

Metode penelitian mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK No. 45 ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena tujuan penelitiannya tidak berkaitan dengan angka-angka (Moleong, 2007), melainkan deskripsi, uraian, serta gambaran mengenai penyusunan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Sabilurrosyad.

Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Sabilurrosyad dengan alamat Jalan Raya Candi VI Blok C No. 303 Gasek, Kode Pos: 65146, Kota Malang, Jawa Timur. Pondok ini didirikan oleh orang-orang yang cukup berpengaruh di Kota Malang yaitu: KH. Abdullah dan KH. M. Baidowi Muslich yang juga merupakan ketua MUI Kota Malang dan sekarang dipimpin oleh KH. Marzuki yang juga mempunyai pengaruh di Kota Malang.

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Data Primer.
 - a) Observasi, dilakukan dengan cara melihat secara langsung proses penyusunan laporan keuangan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad. Mulai dari melihat transaksi apa saja yang terjadi dan siklus akuntansi apa saja yang dilakukan sampai dengan tersusunnya laporan keuangan.
 - b) Wawancara, dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Wawancara dilakukan dengan ketua yayasan/pengurus pondok pesantren, bagian keuangan, bendahara/kasir, bagian akuntansi dan pihak-pihak lain yang terkait. Hasil wawancara tersebut kemudian dicatat secara lengkap untuk mendapatkan informasi baik tertulis ataupun lisan terkait penyusunan laporan keuangan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang selama ini sudah dilakukan untuk kemudian dianalisis. Berdasarkan wawancara akan diketahui bentuk laporan keuangan yang sudah disusun oleh pondok pesantren Sabilurrosyad.
 - c) *Focus Group Discussion* (FGD), dilakukan dengan mengumpulkan semua pihak untuk mengetahui penyusunan dan akuntabilitas publik yang bisa diberikan berupa laporan keuangan di Pondok Pesantren ini. Pesertanya adalah: pemilik pondok, manajemen pondok, perwakilan ustad/pengajar, perwakilan santri, wali santri dan perwakilan karyawan pondok.
- 2) Data Sekunder.
 - a) Metode kepastakaan, terdiri dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren, dan lain sebagainya. Literatur diperlukan untuk memberikan

teori bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya yaitu: SAK ETAP, PSAK No. 45 dan buku pedoman pondok pesantren

- b) Metode dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data berupa bukti-bukti transaksi akuntansi, buku-buku yang digunakan untuk pencatatan transaksi akuntansi dan laporan keuangan yang ada. Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti yang menunjang tujuan penelitian implementasi SAK ETAP dan PSAK No. 45 dalam penyusunan laporan keuangan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad. Dokumen yang diperlukan: bukti transaksi, formulir, Laporan keuangan dan catatan akuntansi yang telah ada.

Metode triangulasi dilakukan dalam penelitian ini guna memeriksa keabsahan data yang didapat oleh peneliti selama pengambilan data berlangsung dengan memanfaatkan suatu data lain untuk dikonfirmasi kebenarannya. Dalam menganalisis data dan menjawab masalah penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Survey pendahuluan, dilakukan saat penelitian sebelumnya yang menemukan kendala pada pondok pesantren tersebut terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya. Pihak pondok pesantren ingin mengetahui bagaimanakah menyusun laporan keuangan yang baik dan benar itu, mengingat sumber daya manusia di pondok pesantren tersebut yang terbatas pengetahuannya terkait akuntansi.
2. Mengidentifikasi semua transaksi yang terjadi di pondok pesantren yang terkait dengan data-data akuntansi. Teknik yang digunakan pada tahap ini adalah:
 - a. Wawancara, dilakukan kepada pengurus pondok, bendahara dan bagian keuangan pondok pesantren mengenai filosofi, kebijakan dan sistem pelaporan keuangan yang sudah ada sebelumnya meskipun masih sederhana
 - b. Observasi, dilakukan dengan melihat langsung bagian akuntansi disana saat menyusun laporan keuangan, apa saja yang dibuat mulai dari bukti transaksi sampai dengan tersusunnya laporan keuangan .
 - c. Dokumentasi, mengumpulkan formulir, faktur, nota, bukti transaksi lainnya, catatan akuntansi serta laporan keuangan yang telah disusun.
 - d. *Focus Group Discussion* (FGD). Pesertanya adalah: pemilik pondok, manajemen pondok, perwakilan ustad/ pengajar, perwakilan santri dan perwakilan karyawan pondok, bendahara yayasan dan sekolah yang berada di bawah yayasan Sabilurrosyad. FGD digunakan sebagai triangulasi atas keterangan-keterangan yang didapat dari pimpinan pondok/ pengurus serta bendahara pondok, dokumentasi yang ada serta observasi yang telah dilakukan. Jadi FGD ini dilakukan untuk lebih memastikan kebenaran transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh bendahara/akuntannya.
3. Melakukan analisis. Tahap analisis dilakukan dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh pondok pesantren tersebut menggunakan standar akuntansi yang seharusnya dalam menyusun laporan keuangan. Caranya

adalah dengan membandingkan data yang sudah dengan teori dalam hal ini SAK ETAP dan PSAK No. 45 yaitu berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan apakah sudah sesuai ataukah belum. Pada tahap ini penggunaan literatur sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimanakah laporan keuangan yang sesuai dengan standar disusun yang bisa meningkatkan akuntabilitas publik. Untuk mengetahui apa ada kelemahan ataupun kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan yang sudah diterapkan pada Pondok Pesantren Sabilurrosyad, bisa dilakukan dengan membandingkan antara laporan keuangan yang sudah ada dengan SAK ETAP dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan, sedangkan penyajian laporan keuangan didasarkan pada PSAK No. 45. Berdasarkan teori tersebut akan bisa diketahui bagian-bagian mana yang mungkin terdapat kesalahan agar dapat disesuaikan dengan standar akuntansi yang seharusnya. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Catatan-catatan yang telah dilakukan
 - 2) Formulir-formulir yang digunakan
 - 3) Bukti-bukti transaksi
 - 4) Laporan keuangan yang sudah disusun
4. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK No, 45. Dalam tahap penyusunan laporan keuangan hal yang dilakukan pertama adalah mengetahui transaksi-transaksi akuntansi yang terjadi yang dibuktikan dengan bukti transaksi, membuat jurnal umum tiap transaksi tersebut berdasarkan bukti transaksinya berdasarkan SAK ETAP dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Melakukan posting ke buku besar masing-masing akun/rekening, penyajian laporan keuangan sesuai dengan format yang ada di PSAK No. 45
 5. Kesimpulan dan rekomendasi berupa laporan keuangan pondok pesantren yang sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK No. 45. Tahap ini dihasilkan berdasar penjabaran data penelitian beserta analisis sesuai dengan teori-teori dan literatur yang ada. Kesimpulan berisi bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sudah dilakukan oleh pondok pesantren Sabilurrosyad selama ini dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya yaitu SAK ETAP dan PSAK No. 45.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Laporan Keuangan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad

Laporan keuangan yang telah disusun oleh pondok pesantren Sabilurrosyad adalah laporan penerimaan dan pengeluaran uang beserta saldonya, baik itu surplus atau defisit. Metode pencatatan akuntansinya menggunakan *cash basis*, dimana transaksi diakui dan dicatat saat kas diterima atau dibayarkan. Sebagai dampak atas penggunaan metode tersebut laporan posisi keuangan masih belum tersusun di pondok pesantren ini. Aset yang ada hanya dicatat dalam laporan kepemilikan aset pondok pesantren. Pengukuran atas nilai transaksi menggunakan harga historis atau harga yang dibayarkan saat memperoleh aset tersebut, belum pernah ada penyesuaian harga dengan harga pasar atau nilai wajar saat ini. Tidak pernah dilakukan jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, jurnal penutup ataupun jurnal

koreksi. Pencatatan masih menggunakan *single entry*, dimana bendahara membuat kolom penerimaan dan kolom pengeluaran yang dirinci dalam berbagai belanja, kemudian ditotal pada periode akuntansi tertentu yang biasanya adalah bulanan dan tahunan.

Yayasan pondok pesantren Sabilurrosyad memiliki beberapa unit yang dikelola dalam satu manajemen yayasan, yaitu:

1. SMPI Sabilurrosyad
2. SMAI Sabilurrosyad
3. TPQ
4. Madrasah Diniyah
5. Pondok pesantren putra
6. BLK

Pengelolaan SMPI dan SMAI berada dalam tanggung jawab orang yang sama yaitu kepala sekolah SMPI, bendahara juga menjadi satu sehingga pelaporan pada bendahara yayasan juga menjadi satu. Madrasah Diniyah, TPQ dan BLK dikelola oleh satu orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan akademik dan juga keuangan. Sedangkan pondok pesantren putra dikelola oleh 1 orang sendiri, dimana pondok pesantren putra ini mencakup siswa SMPI, siswa SMAI, maupun mahasiswa yang ingin mondok di pondok pesantren ini.

Laporan keuangan disusun oleh masing-masing unit tiap bulan untuk kepentingan intern mereka dan laporan tahunan diserahkan pada bendahara yayasan. Penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam buku kas sehingga bisa diketahui informasi terkait berapa saldo kas setiap saat. Penerimaan infaq siswa dicatat dalam kartu SPP dan buku SPP (buku kas masuk) yang disimpan oleh bendahara sekolah. Semua unit menyusun anggaran yang diperlukan selama satu tahun yang kemudian diajukan kepada yayasan untuk mendapat persetujuan ketua yayasan yang kemudian dapat dieksekusi oleh bendahara. Sedangkan pencairan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap. Selalu ada dana cadangan yang digunakan untuk keperluan mendadak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Berdasarkan aturan pemerintah untuk SMPI dan SMAI juga sudah menerima bantuan berupa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah dan BOS Nasional sejumlah siswa dikalikan dengan jumlah tertentu sesuai aturan yang berlaku. SMPI dan SMAI juga sudah melaporkan belanja yang dikeluarkan yang berasal dari dana bantuan tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara pada bendahara SMPI dan SMAI Sabilurrosyad sebagai berikut:

“Untuk laporan belanja yang berasal dari dana BOS baik itu BOS Daerah ataupun BOS Nasional sudah kami susun sesuai dengan atura pemerintah terkait pelaporan dana BOS. Kemudian terkait dengan pembelian barang modal seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, mesin dan lainnya dicatat dalam Daftar Barang Modal. Barang modal tersebut biasanya dibeli oleh Waka Sarpras.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja yang berasal dari dana BOS sudah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan aturan pemerintah terkait pengelolaan dana BOS. Sedangkan untuk pembelian barang modal dilakukan oleh Wakil kepala Bidang Sarpras dan dicatat oleh bendahara dalam Daftar Barang Modal.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan SAK ETAP Dalam Hal Pengakuan, Pengukuran dan Pencatatan Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad

Dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP harus mencakup 3 hal yaitu: pengakuan (kapan transaksi diakui), pengukuran (berapa nilai yang diakui dan menggunakan dasar harga apa), dan pencatatan (jurnal akuntansi yang dibuat). Metode pencatatan yang harus digunakan adalah metode akrual basis, dimana aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban diakui pada saat transaksi terjadi meskipun kas belum diterima atau dibayar. Dalam hal pengakuan, pondok pesantren Sabilurrosyad masih belum menggunakan metode akrual basis tapi masih menggunakan metode *cash basis*. Oleh karena itu, pengakuan aset, kewajiban, aset neto, pendapatan dan beban diakui saat kas diterima atau dibayar. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara pesantren sebagai berikut:

"Saya mencatat transaksi itu ya kalo pas terima atau keluarkan uang saja, kalo belum terima atau keluarkan uang ya belum saya catat, biasanya begitu. Kalo besarnya harga yang saya catat ya sesuai dengan bukti pendukung yang ada, misalkan di bukti Rp 1.000.000,- ya saya catat sesuai itu, kan sesuai dengan yang buktinya. Kalo masalah apa itu penilaian kembali, kami belum pernah melakukannya, setahu kami yang semua transaksi dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau dibayarkan."

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui pula bahwa dalam hal pengukuran, pondok pesantren ini masih mengukur transaksi keuangannya dengan nilai historis yaitu harga beli atau harga perolehannya. Harga tersebut tidak pernah disesuaikan ataupun dinilai kembali sebesar nilai wajar saat ini.

Pondok pesantren Sabilurrosyad belum melakukan pencatatan berupa jurnal akuntansi, melainkan masih menggunakan *single entry* berupa kolom yang berisi tiap pemasukan atau pengeluaran yang kemudian ditotal dalam suatu periode tertentu yaitu bulanan. Padahal seharusnya pondok pesantren mencatat transaksinya dengan metode akrual basis, dimana transaksi dicatat saat transaksi terjadi meskipun kas belum diterima atau dibayarkan. Pencatatan akrual basis mencatat hutang dan piutang saat ada transaksi yang sudah terjadi tapi belum terbayarkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang paham terkait ilmu akuntansi khususnya dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang seharusnya.

Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk pengungkapan dalam SAK ETAP. CALK memberikan informasi terkait metode akuntansi yang digunakan, transaksi non kas, transaksi yang memerlukan penjelesan lebih lanjut dan informasi lain yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusannya. Ada beberapa transaksi khusus yang perlu adanya pengungkapan yang dituntut dalam SAK ETAP. Pondok pesantren Sabilurrosyad belum pernah melakukan pengungkapan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan berbentuk sederhana dan masih *single entry*, juga karena ketidaktahuan mereka terkait hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nikmatuniayah (2014) dimana di Yayasan Daruttaqwa kota Semarang juga masih belum melakukan pengungkapan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan sesuai

dengan SAK ETAP dan PSAK No. 45. Demikian pula dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zamzami (2015) di Yayasan Al Inayah Purwosari, yang hasilnya juga belum dilakukan pengungkapan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan di Yayasan ini. Hal ini menunjukkan ketidaktahuan pondok pesantren atas aturan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK No. 45. Kurangnya sumber daya manusia yang paham terkait akuntansi menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren selama ini.

Penyajian Laporan Keuangan Sesuai Dengan PSAK No. 45 Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad

Berdasarkan buku pedoman pondok pesantren (BI dan IAI, 2018) yang diadopsi dari PSAK No. 45, terdapat 3 laporan keuangan wajib yang harus dibuat oleh pondok pesantren yaitu: Laporan Posisi Keuangan yang menggambarkan jumlah aset, liabilitas dan aset neto yang dimiliki pada suatu saat tertentu, Laporan Aktivitas yang menggambarkan kinerja pondok pesantren pada periode tertentu, dan Laporan Arus Kas yang menggambarkan jumlah kas masuk, kas keluar serta saldo kas di awal dan akhir periode tertentu. Pondok pesantren Sabilurrosyad masih belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45. Laporan yang tersusun hanya laporan kas masuk dan kas keluar serta selisihnya pada satu periode tertentu. Selain itu mereka juga menyusun Rincian penerimaan dan pengeluaran serta laporan kepemilikan aset pondok pesantren. Namun laporan arus kas sudah tersusun di pondok pesantren ini. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara pesantren berikut ini:

"Laporan yang telah kami buat ya berupa laporan penerimaan, laporan pengeluaran dan laporan asset pondok pesantren. Tiga laporan itu saja yang dibutuhkan untuk pertanggungjawaban selama ini. Kalo ada laporan-laporan yang lain ya kami tidak tau. Nah kalo rincian transaksinya kami buat buku kas yang berisi tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo itu dicatat tiap ada transaksi baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga tau berapa saldo uang pada saat tertentu. Buku kas itu biasanya terus kami buat laporan ringkasnya dalam satu bulan berapa saldo kas awal bulan, berapa penerimaan kas dan berapa pengeluaran kasnya sehingga tau saldo akhir bulan berapa."

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian Arifin (2014) pada Yayasan Nazhatut Thullap tentang pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren. Di pondok pesantren tersebut juga membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan penerimaan kas, laporan pengeluaran kas, laporan aset pesantren dan laporan saldo kas tiap akhir bulan. Fauzi (2017) mengungkapkan bahwa akuntabilitas dana di pondok pesantren dimulai dengan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban. Kualitas pertanggungjawaban tergantung pada performan para petugas di pondok pesantren dalam hal ini Kyai dan pembantunya yang duduk dalam kepengurusan pesantren. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pesantren sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan kemampuan Kyai beserta pengurus lainnya dalam memaknai suatu laporan keuangan dan penting tidaknya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga lebih akuntabel.

SIMPULAN

Laporan keuangan yang telah disusun oleh pondok pesantren Sabilurrosyad adalah laporan penerimaan dan pengeluaran uang beserta saldonya baik itu surplus atau defisit. Metode pencatatan akuntansi menggunakan *cash basis* dimana transaksi diakui dan dicatat saat kas diterima atau dibayarkan. Sebagai dampak atas penggunaan metode tersebut laporan posisi keuangan masih belum tersusun di pondok pesantren ini. Aset yang ada hanya dicatat dalam laporan kepemilikan aset pondok pesantren. Pengukuran atas nilai transaksi menggunakan harga historis atau harga yang dibayarkan saat memperoleh aset tersebut, belum pernah ada penyesuaian harga dengan harga pasar atau nilai wajar saat ini. Tidak pernah dilakukan jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, jurnal penutup ataupun jurnal koreksi. Pencatatan masih menggunakan *single entry*, dimana bendahara membuat kolom penerimaan dan kolom pengeluaran yang dirinci dalam berbagai akun pengeluaran (belanja), kemudian ditotal pada periode akuntansi tertentu yang biasanya adalah bulanan dan tahunan.

Pengungkapan yang dilakukan di pondok pesantren seharusnya dilaporkan dalam Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Namun pada kenyataannya, pondok pesantren Sabilurrosyad masih belum melakukan pengungkapan karena CALK tidak disusun disana. Terdapat 3 laporan keuangan wajib yang harus dibuat oleh pondok pesantren yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas. Pondok pesantren Sabilurrosyad masih belum menyusun Laporan posisi keuangan, dan laporan aktivitas masih disusun berbasis kas.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat direkomendasikan bagi pondok pesantren Sabilurrosyad untuk bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK 45 yang merupakan standar akuntansi keuangan yang sesuai untuk pondok pesantren. Proses penyusunan laporan keuangan baik dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, pengungkapan, dan penyajian juga harus disesuaikan dengan standar tersebut diatas. Buku pedoman akuntansi pondok pesantren juga sudah memberikan petunjuk secara teknis bagaimana mereka harus menyusun laporan keuangan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun buku pedoman pondok pesantren telah disusun, disahkan dan diwajibkan bagi pondok pesantren untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, tapi masih banyak pondok pesantren yang tidak mematuhi. Kekurangan sumber daya manusia di Pondok Pesantren khususnya yang memahami ilmu akuntansi menjadi penyebab gagalnya implementasi buku pedoman akuntansi pondok pesantren seperti yang diharapkan. Oleh karena itu Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia juga harus mulai untuk memikirkan solusi akan hal itu, misalnya dengan melakukan sosialisasi serta pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia. Selain itu bisa juga dengan menyederhanakan standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan khususnya di pondok pesantren yang masih kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, Pipit Rosita. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*. Vol. 1: No. 2.
- Arifin, Zaenal. (2014). Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren Studi pada Yayasan Hazhatut Thullab. *Skripsi*. STIESIA. Surabaya.
- Fauzi, Ahmad. (2017). Manajemen Dana dan Sumber Dana Pondok Pesantren. *Tasry'*: Vol 24: No. 1.
- Ikatan Akuntan Indonesia & Bank Indonesia. (2018). *Buku Pedoman Akuntansi Pesantren*.
- Ikatan Akuntan Indonesia & Bank Indonesia. (2009). *SAK ETAP*
- Ikatan Akuntan Indonesia & Bank Indonesia. (2011). *PSAK No. 45*
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nikmatuniayah. (2014). Penerapan Teknologi Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP dan PSAK 45 IAI pada Yayasan Daruttaqwa Kota Semarang. *Prosiding SNA PP: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. EISSN 2303-2472, Vol 4: No. 1.
- Sulistiani, Dwi. (2019). Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol 12: No. 2.
- Tinungki, Angelia NM dan Pusung, Rudy J. (2014). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 pada Panti Sosial Tresna Werdha. *Skripsi*.
- Zamzami, Najib. (2015). Perancangan sistem informasi akuntansi pada Yayasan Al-Inayah Purwosari, Pasuruan. *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim.

LAMPIRAN PENELITIAN:

Laporan Keuangan yang telah disusun oleh Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Malang

Lampiran 1**Yayasan Pondok Pesantren Sabilurrosyad****Laporan Pendapatan dan Belanja****Periode: Tahun 2018**

Pendapatan:	Jumlah
1. Pendapatan dari SMPI Sabilurrosyad	xxx
2. Pendapatan dari SMAI Sabilurrosyad	xxx
3. Pendapatan dari TPQ	xxx
4. Pendapatan dari Madrasah Diniyah	xxx
5. Pendapatan dari BLK	xxx
6. Pendapatan dari Pondok Pesantren Putra	xxx
Total Pendapatan	xxx
Belanja:	
1. Belanja untuk SMPI Sabilurrosyad	(xxx)
2. Belanja untuk SMAI Sabilurrosyad	(xxx)
3. Belanja untuk TPQ	(xxx)
4. Belanja untuk Madrasah Diniyah	(xxx)
5. Belanja untuk BLK	(xxx)
6. Belanja untuk Pondok Pesantren Putra	(xxx)
Total Belanja	(xxx)
Surplus/Defisit	xxx

Lampiran 2**Yayasan Pondok Pesantren Sabilurrosyad-Unit SMPI Sabilurrosyad****Buku Kas****Periode: Tahun 2018**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo

Lampiran 3
Yayasan Pondok Pesantren Sabilurrosyad-Unit SMPI Sabilurrosyad
Rincian Pendapatan dan Belanja
Periode: Tahun 2018

Tgl	Keterangan	Pend. SPP	Pend. DPP	B. gaji	B. ATK	B. pemeliharaan	B. PLN, Telp, PAM	B. Transportasi	B. Konsumsi
Total									

Lampiran 4
Yayasan Pondok Pesantren Sabilurrosyad-Unit SMPI Sabilurrosyad
Daftar Barang Modal
Periode: Tahun 2018

No.	Nama Barang & Spesifikasi	Jumlah (Unit)	Tgl. Beli	Harga Beli	Gambar

Lampiran 5
Yayasan Pondok Pesantren Sabilurrosyad-Unit SMPI Sabilurrosyad
Daftar Bahan

No.	Nama Bahan/ATK	Harga Beli	Jumlah		Tgl. Beli & Tgl. Ambil
			Masuk	Keluar	